

Tinjauan Mata Kuliah

Buku Materi Pokok (BMP) ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan utama dari materi mata kuliah Perekonomian Indonesia yang ditawarkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Mata kuliah ini mempunyai bobot tiga satuan kredit semester (3 SKS) sehingga mahasiswa disarankan menyediakan waktunya sesuai kaidah SKS dengan membaca dan mempelajari modul serta materi pendukung secara mandiri, mengikuti tutorial, serta mengerjakan latihan dan tugas. BMP Perekonomian Indonesia ini terdiri dari 9 modul dan pada masing-masing modul terdapat 2 kegiatan belajar.

Perbandingan sistem ekonomi Indonesia dengan dua sistem ekstrem, yaitu kapitalis dan sosialis mengawali pembahasan yang tertuang pada bagian awal Buku Materi Pokok Perekonomian Indonesia (ESPA 4314). Pembahasan tersebut menggunakan pendekatan historis yang dikaitkan dengan perkembangan ekonomi kontemporer. Lebih lanjut dibahas perlunya reformasi ekonomi pasca-krisis moneter yang coraknya makin diatur oleh IMF dan Bank Dunia melalui Program Penyesuaian Struktural.

Menginjak modul dua, kita akan belajar mengenai sistem pertanian dan industrialisasi di Indonesia. Pembahasan ditekankan pada proses transformasi pertanian Indonesia ke era industrialisasi yang dewasa ini berkembang pesat beserta masalah-masalah struktural yang melingkupinya. Modul ini memfokuskan pada analisis struktur industri di Indonesia yang cenderung terkonsentrasi dan analisis kebijakan membangun industri nasional untuk menghadapi tantangan global.

Keterkaitan antara kebijakan keuangan, perbankan, dan kebijakan anggaran pemerintah secara umum merupakan pokok bahasan yang terdapat pada modul tiga. Modul ini juga menguraikan sejarah perkembangan perbankan, kebijakan keuangan-perbankan pemerintah dan masalah-masalah struktural yang dihadapi perbankan Indonesia, yang berpengaruh besar terhadap sektor moneter.

Adanya hubungan antara struktur investasi dan peningkatan manfaat perdagangan internasional bagi pelaku ekonomi Indonesia merupakan pokok bahasan yang terdapat pada modul empat. Pada bagian awal diuraikan perihal perkembangan investasi di Indonesia, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing, termasuk investasi oleh ekonomi rakyat. Sementara itu, pada bagian selanjutnya dibahas mengenai perkembangan dan kinerja perdagangan internasional Indonesia dan masalah-masalah yang dihadapi pelaku ekonomi dalam negeri dalam meningkatkan manfaat perdagangan mereka. Modul ini juga menyinggung masalah kebijakan perdagangan internasional pemerintah, baik dalam konteks liberalisasi maupun proteksi.

Modul kelima membahas permasalahan koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan agenda demokratisasi ekonomi yang dihadapkan pada agenda-agenda privatisasi yang didasarkan pada kebijakan liberalisasi ekonomi. Pada bagian awal dijelaskan prinsip dasar dan sejarah perkembangan koperasi di Indonesia beserta masalah struktural yang menghambat kemajuannya. Selain koperasi, modul ini juga

memaparkan mengenai privatisasi serta dampak ekonomi-politik dari pelaksanaan privatisasi dilengkapi dengan contoh kasus pelaksanaan privatisasi terhadap beberapa BUMN di Indonesia.

Permasalahan utang luar negeri dan korupsi yang merajalela di Indonesia menjadi pokok bahasan utama pada modul enam. Ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri makin diperparah dengan berkembangnya praktik-praktik korupsi, termasuk dalam pengelolaan utang itu sendiri. Secara khusus juga dibahas mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk memecahkan masalah utang luar negeri, seperti halnya penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan restrukturisasi utang.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan beberapa contoh permasalahan pembangunan yang ada di Indonesia. Permasalahan tersebut menjadi topik yang menarik untuk dibahas pada modul tujuh. Modul ini juga membahas struktur ketenagakerjaan dan lapangan kerja formal dan informal yang ada di Indonesia. Pada bagian akhir dibahas pula kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran beserta cara-cara alternatif untuk mengatasi masalah pengangguran dengan tidak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tinggi melalui investasi dalam skala besar.

Penerapan otonomi daerah memungkinkan setiap daerah untuk membangun sumber daya manusia secara lebih intensif. Topik mengenai otonomi daerah dan pembangunan sumber daya manusianya merupakan pokok bahasan yang terdapat pada modul delapan. Berikutnya dibahas perihal konsep dan penerapan desentralisasi fiskal yang makin mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan.

Globalisasi ekonomi yang berimbas pada berbagai krisis global yang merefleksikan terjadinya krisis ilmu ekonomi merupakan pokok bahasan yang terdapat pada modul sembilan. Modul ini juga mengungkap peranan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO yang turut mendesain wujud globalisasi ekonomi di atas. Pada bagian berikutnya, modul ini membahas berbagai krisis global, seperti halnya meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi, meluasnya degradasi moral, dan makin parahnyanya kerusakan lingkungan sebagai ekses globalisasi ekonomi

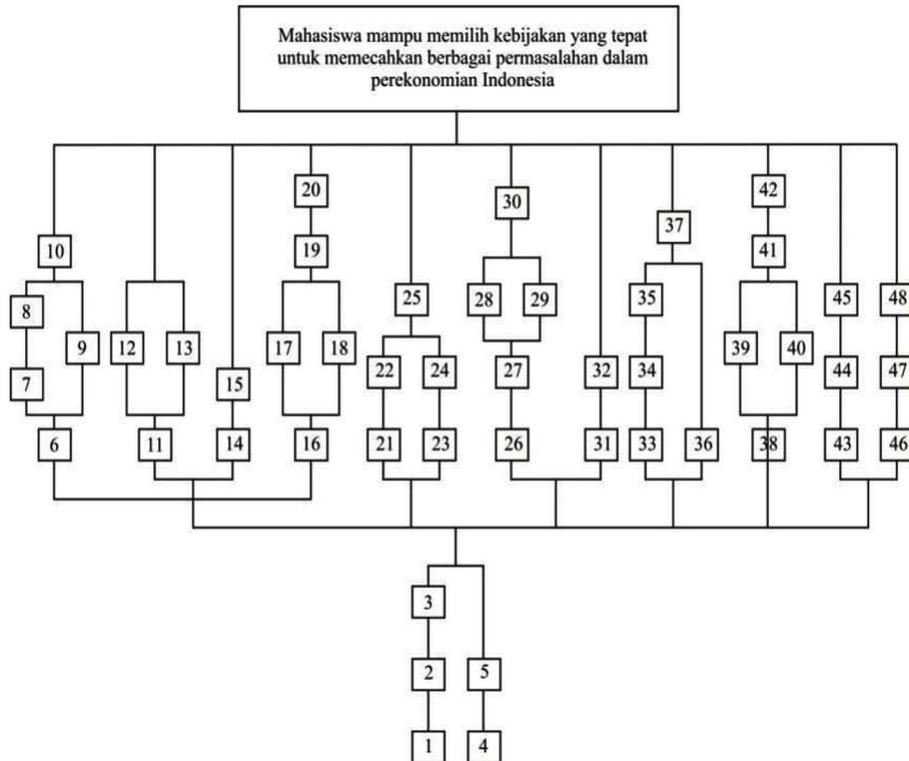
Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari BMP Perekonomian Indonesia maka ikutilah petunjuk belajar berikut.

1. Pelajari BMP ini sesuai struktur materi agar Anda mendapat pemahaman yang runut, jelas, dan komprehensif.
2. Buatlah catatan pinggir pada BMP Anda untuk konsep-konsep yang Anda anggap perlu diperdalam melalui diskusi dengan kelompok belajar Anda atau dengan tutor *online*.
3. Buatlah *highlight* atau tanda tertentu pada uraian-uraian yang Anda anggap penting.
4. Buatlah rangkuman kecil secara baik dan benar setiap kali Anda mempelajari satu kegiatan belajar.
5. Kerjakan tugas dan latihan secara maksimal dan ukur pemahaman Anda melalui umpan balik.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari mata kuliah Perekonomian Indonesia, Anda dapat menghubungi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Terbuka melalui nomor telepon (021) 7490941 pesawat 2105, 2106 atau 2109; melalui surat dengan alamat Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang 15418; atau melalui *homepage* Universitas Terbuka di <http://www.ut.ac.id>.

Selamat belajar, sukses selalu!

Peta Kompetensi Perekonomian Indonesia/ESPA4314/3 sks



Keterangan:

1. Menjelaskan perbedaan sistem ekonomi dan sejarah perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia.
2. Menjelaskan keterkaitan antara Sistem Ekonomi Pancasila dan Sistem Ekonomi Kerakyatan.
3. Merumuskan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia saat ini beserta gagasan-gagasan pengembangannya.
4. Menjelaskan latar belakang perlunya reformasi ekonomi Indonesia pasca krisis moneter 1997/1998.
5. Menerangkan daya tahan dan peranan ekonomi rakyat di saat krisis.
6. Menjelaskan sejarah perkembangan pertanian dan industrialisasi Indonesia.
7. Menjelaskan masalah struktural pertanian dan industrialisasi berdasarkan kondisi dan struktur yang ada untuk mencari alternatif pemecahannya.
8. Menerangkan nasib dan kesejahteraan petani kecil di Indonesia.
9. Menganalisis kebijakan dan tantangan industrialisasi di Indonesia.
10. Menganalisis kebijakan dan strategi pembangunan pertanian pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan liberalisasi pertanian.

11. Menjelaskan sejarah serta perkembangan kondisi dan kebijakan perbankan di Indonesia.
12. Menjelaskan masalah-masalah struktural yang dihadapi perbankan dan sektor keuangan pada umumnya serta merumuskan alternatif pemecahannya.
13. Menjelaskan struktur keuangan negara (APBN) dan kebijakan anggaran pemerintah dalam pengelolaannya.
14. Menjelaskan masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan negara (APBN) dan merumuskan cara pemecahannya.
15. Menjelaskan perlunya Lembaga Keuangan Mikro dan peranan perbankan dalam pengembangannya.
16. Menjelaskan konsep, kinerja, dan masalah perdagangan internasional Indonesia.
17. Menjelaskan perkembangan dan dinamika investasi baik dalam negeri maupun asing di Indonesia.
18. Menjelaskan kompleksitas masalah struktural pengembangan investasi yang berorientasi kesejahteraan rakyat banyak.
19. Menjelaskan kebijakan yang seharusnya ditempuh pemerintah untuk mengembangkan investasi, khususnya investasi oleh ekonomi rakyat berbasis sumber daya lokal.
20. Menganalisis kebijakan yang seharusnya ditempuh pemerintah dalam menyikapi agenda perdagangan bebas.
21. Menjelaskan prinsip dan sejarah pengembangan koperasi di Indonesia.
22. Menjelaskan kinerja, peranan, dan masalah-masalah struktural yang dihadapi koperasi Indonesia.
23. Menjelaskan konsep, latar belakang, dan tujuan pelaksanaan privatisasi di Indonesia.
24. Menjelaskan dampak ekonomi-politik privatisasi terhadap ekonomi rakyat Indonesia berdasarkan studi kasus yang ada.
25. Menjelaskan dampak privatisasi terhadap perwujudan demokratisasi ekonomi melalui koperasi.
26. Menjelaskan tujuan, jenis-jenis, dan mekanisme perolehan utang luar negeri Indonesia
27. Menjelaskan kondisi keterjebakan Indonesia pada utang luar negeri.
28. Merumuskan solusi-solusi alternatif untuk mengatasi masalah keterjebakan pada utang luar negeri.
29. Menjelaskan dampak keterjebakan pada utang luar negeri bagi perekonomian Indonesia.
30. Menjelaskan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menangani masalah utang luar negeri.
31. Menjelaskan modus-modus korupsi dan cara-cara pemberantasan korupsi di Indonesia.
32. Menjelaskan parahnya kondisi korupsi di Indonesia dan dampak korupsi terhadap perekonomian nasional.

33. Menjelaskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
34. Menjelaskan sebab-sebab struktural terjadinya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
35. Menjelaskan struktur ketenagakerjaan, lapangan kerja, dan karakteristik pengangguran di Indonesia.
36. Menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
37. Menganalisis kondisi dan perkembangan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
38. Menjelaskan latar belakang dan tujuan penerapan otonomi daerah dan perlunya pembangunan manusia Indonesia.
39. Menjelaskan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
40. Menjelaskan landasan konstitusional dan pengukuran hasil pembangunan manusia di Indonesia.
41. Menjelaskan hasil-hasil penerapan otonomi daerah dalam mendorong terwujudnya demokratisasi ekonomi di Indonesia.
42. Menganalisis kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia.
43. Menjelaskan sejarah dan latar belakang globalisasi ekonomi di Indonesia.
44. Menjelaskan bentuk-bentuk dan dampak globalisasi terhadap Perekonomian Indonesia.
45. Menjelaskan resistensi terhadap globalisasi ekonomi yang merugikan ekonomi rakyat Indonesia.
46. Menjelaskan kritik-kritik terhadap ilmu ekonomi konvensional dan perlunya pengembangan ilmu ekonomi alternatif di Indonesia.
47. Menjelaskan dominasi ilmu ekonomi konvensional dalam pendidikan ekonomi Indonesia.
48. Menganalisis filsafat ilmu ekonomi Pancasila dan upaya-upaya pengembangannya.